

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk mempermudah mengetahui hasil seluruh laporan penelitian “Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat (1946 – 1950)”, dengan memperoleh gambaran secara singkat dan jelas, maka didalam bab V yang merupakan penutup skripsi ini disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi intisari dari keseluruhan hasil laporan penelitian sehingga diperoleh satu kesatuan yang utuh dari seluruh uraian yang telah disajikan.

Adapun kesimpulan dari skripsi adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang Terbentuknya Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk dari hasil pertemuan seluruh Kerajaan / Kesultanan, Panembahan dalam rangka untuk menggabungkan diri menjadi sebuah negara yang disebut Negara Borneo Barat atau Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Sultan Hamid II Alkadrie di Pontianak. Berdasarkan putusan gabungan Kerajaan / Kesultanan yang ada di Borneo Barat pada 22 Oktober 1946 tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Dewan Borneo. Sebanyak 40 tokoh masyarakat Kalimantan Barat menandatangani kesepakatan tertulis Nomor 20/L.

Keputusan gabungan Kerajaan atau Kesultanan di Kalimantan Barat tersebut kemudian mewujudkan suatu ikatan federasi dengan nama “Daerah Istimewa Kalimantan Barat”. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibagi dalam 12 Swapraja (pemerintahan sendiri) dan 3 Neo Swapraja, yakni Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan Neo Swapraja, yaitu Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Putussibau.

2. Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) merupakan sebuah negara bersistem pemerintahan federal. DIKB merupakan Daerah Bagian dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 12 Mei 1947. DIKB diperkuat Residen Kalimantan Barat dengan surat keputusan tanggal 10 Mei 1948 Nomor 161. Sebelumnya pada tahun 1948 keluar *Besluit Leutenant Gouverneur Generaal* tanggal 2 Mei 1948 Nomor 8 Staatblad Lembaran Negara 1948/58 yang mengakui Kalimantan Barat berstatus Daerah Istimewa. Sultan Hamid II menjadi Kepala Daerah dan dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian (BPH), Sekretaris Umum, Dewan Federal, Residen Kalimantan Barat dan Kepala Swapraja di setiap daerah di Kalimantan Barat. Pada tahun 1948, pemerintah DIKB telah membuat peraturan dasar yang disebut sebagai Peraturan Dasar Anggaran Kalimantan Barat untuk mengatur segala sesuatu

yang berkaitan dengan kegiatan sosial ekonomi dan politik di Kalimantan Barat.

3. Akhir Dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung kedalam NKRI pada tahun 1950, ketika Republik Indonesia Serikat yang berbentuk Federal berubah sistem pemerintahan menjadi Negara Kesatuan. Ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan di Republik Indonesia, berbagai kelompok organisasi masyarakat di Kalimantan Barat seperti Gerakan Persatuan Indonesia (GAPI) pimpinan Dr. Soedarso menuntut untuk membubarkan pemerintahan DIKB. Begitu juga dengan kelompok organisasi – organisasi lainnya seperti Komite Nasional Kalimantan Barat (KNKB) pimpinan Marpaung, Barisan Pemberontak Kalimantan Barat (BPIKB) pimpinan Aliyang. Situasi tersebut juga didukung oleh pemerintah pusat untuk membantu gerakan pembubaran DIKB tersebut dengan mengirim Letkol Inf. Zulkifil Lubis, Tjilik Riwut untuk mempercepat pembubaran DIKB yang dianggap sebagai pemerintahan penjajah sehingga TNI dari pusat yang dipimpin oleh Letkol (Inf) Sukanda Bratamenggala dengan komandan Kapten (Inf) Johannes Pejoh dikirim untuk mengamankan situasi tersebut. Pada tahun 1951, keluarlah surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/10 yang mencakup segala ketentuan tentang pembagian secara administratif daerah Kalimantan Barat yang dahulunya dikenal dengan nama Daerah Istimewa Kalimantan Barat kedalam 6 daerah

Kabupaten administratif yakni Pontianak, Ketapang, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan sebuah daerah Kota Administratif Pontianak.

B. Saran

Merujuk dari hasil penelitian ini, maka beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, agar bisa mengenal tentang sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang pernah menjadi bagian masa lalu Kalimantan Barat pada tahun 1946 – 1950 pada masa Republik Indonesia Serikat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sejarah sehingga dapat mengetahui tentang sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi generasi muda sekarang.
3. Dalam bidang pendidikan diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kemajuan pendidikan di Kalimantan Barat terutama tentang kajian sejarah lokal sehingga dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang berdaya guna bagi nusa dan bangsa.